

PERILAKU PEMILIH WARGA EKS-LOKALISASI DOLLY PADA PEMILU 2019 (DPRD KOTA SURABAYA DAPIL 4)

Muhammad Alifian Rasyidin

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: muhammad.18048@mhs.unesa.ac.id

Eko Satriya Hermawan

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: ekohermawan@unesa.com

Abstrak

Prostitusi merupakan salah satu bentuk dari fenomena sosial pada masyarakat. Pada Indonesia, khususnya Jawa Timur masih terdapat prostitusi dalam skala terbesar se-Asia Tenggara yang pernah ada. Tepatnya berada pada daerah yang biasa disebut dengan Gang Dolly, Kota Surabaya. Hingga pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Walikota Kota Surabaya, pemukiman Gang Dolly beserta pelaku prostitusi berhasil dibubarkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan mengenai bagaimana perilaku pemilih oleh mantan warga Gang Dolly yang pernah dibubarkan mata pencahariannya oleh Walikota Kota Surabaya saat itu, dengan tetap berjalannya PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4). Studi kasus penelitian ini adalah perilaku pemilih warga eks-lokalisasi Gang Dolly. Penelitian ini mengkaji bagaimana perilaku pemilih oleh warga eks-lokalisasi Gang Dolly pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4). Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana awal berdirinya Gang Dolly hingga dibubarkan oleh Walikota Kota Surabaya?. 2). Bagaimana perilaku pemilih warga eks-lokalisasi Gang Dolly pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian analisis krisis fakta-fakta sejarah seperti heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa hasil rekapitulasi suara DPRD Dapil 4 menurut situs resmi KPU terdapat 32.206 jiwa dan warga asli eks-lokalisasi Gang Dolly yang menggunakan hak suara pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4). Dimana, suaranya sah sebanyak 16.731 jiwa dan 16.077 jiwa tidak menggunakan suara pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4).

Kata Kunci : Perilaku, Pemilu DPRD dapil 4, eks-lokalisasi

Abstract

Prostitution is a form of social phenomenon in society. In Indonesia, especially East Java, there is still prostitution on the largest scale in Southeast Asia that has ever existed. Precisely located in an area commonly called Gang Dolly, Surabaya City. Until the leadership of Tri Rismaharini as Mayor of Surabaya City, the settlement of Gang Dolly and the perpetrators of prostitution was successfully disbanded. The purpose of this study is to understand, analyze, and describe how the voting behavior of former residents of Gang Dolly whose livelihood was dissolved by the Mayor of Surabaya City at that time, while the 2019 Elections (DPRD Surabaya City Dapil 4) continued. The case study of this research is the voting behavior of ex-localization residents of Gang Dolly. This study examines how the voting behavior of ex-localized residents of Gang Dolly in the 2019 General Elections (DPRD Surabaya City Dapil 4). This research has a problem formulation as follows: 1). How did the Dolly Gang start to be dissolved by the Mayor of Surabaya? 2). How was the behavior of voters from the ex-localization of Gang Dolly in the 2019 general election (DPRD Surabaya Dapil 4). This study uses a descriptive qualitative approach with a crisis analysis study of historical facts such as heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of the study stated that the results of the vote recapitulation of the DPRD for the Regional Elections 4 according to the KPU's official website, there were 32,206 people and the original residents of Gang Dolly's ex-localization who used their voting rights in the 2019 Elections (DPRD City of Surabaya Dapil 4). Where, there were 16,731 valid votes and 16,077 people who did not vote in the 2019 General Elections (DPRD Surabaya City Region 4).

Keywords: Behavior, Election of Regional Representatives Council 4, ex-localization

PENDAHULUAN

Praktik pelacuran merupakan salah satu bentuk polemik sosial yang acapkali timbul dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Timbulnya fenomena praktik pelacuran seringkali menjadi topik yang diperdebatkan, menengok penyebab dan akibat dari terjadinya fenomena tersebut. Praktik pelacuran seringkali dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang melanggar norma masyarakat, peraturan, etika, bahkan agama yang ada dan tersebar di masyarakat. Paradigma masyarakat yang seperti inilah yang menimbulkan anggapan bahwa setiap orang yang tergabung dan menjadi seorang pelacur merupakan seorang yang hina, dan merupakan seseorang yang sudah mendapatkan kucilan dari masyarakat. Paradigma ini tidak hanya diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan pelacuran tersebut saja, namun juga diberikan terhadap tempat dimana kegiatan pelacuran tersebut sering dilaksanakan¹. Paradigma seperti ini juga diberikan oleh sebagian besar masyarakat kota Surabaya terhadap wilayah Gang Dolly. Wilayah Gang Dolly seringkali disebut sebagai wilayah berkumpulnya para pelacur, sehingga acapkali dianggap sebagai tempat yang tidak pantas untuk ditinggali. Paradigma ini juga memberikan dampak terhadap pemimpin Kota Surabaya waktu itu, yakni Ibu Tri Rismaharini yang membubarkan segala operasi yang terjadi di Gang Dolly. Sebelum dibubarkan Gang Dolly ini merupakan kawasan lokalisasi yang terletak di daerah Surabaya Barat tepatnya diantara wilayah Jarak dan Putat Jaya.

Paradigma masyarakat yang menganggap para pelacur merupakan orang-orang hina karena tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang menyimpang dan menyalahi norma hukum, masyarakat, agama, serta nilai-nilai lain yang ada di masyarakat. Padahal apabila kita tarik benang merah diantara itu semua pasti dapat kita temui sebab dan akibat yang melatarbelakangi setiap orang untuk melakukan tindakan tersebut. Terlebih lagi tindakan yang merugikan diri secara pribadi seperti halnya menjadi seorang pelacur yang berada di tempat lokalisasi seperti halnya di wilayah Gang Dolly Surabaya. Selanjutnya, apabila kita menengok dalam sudut pandang pelanggan, pasti ada suatu alasan seseorang melakukan tindakan tersebut pula. Di luar dari besarnya nafsu birahi untuk melaksanakan tindakan tersebut, bisa saja tindakan yang dilakukannya merupakan pelampiasan dari orang tersebut untuk menyelesaikan segala kerumitan dunia yang belum bisa ia selesaikan. Hingga saat ini para pelacur yang sebelumnya bekerja di wilayah Dolly akan tetap beroperasi apabila dirinya memperoleh pesanan dari seseorang yang ingin menggunakan jasa dari dirinya, meskipun pelaksanaannya sudah tidak lagi di wilayah Dolly atau di wilayah luar Dolly. Apabila kita menengok latar belakang alasan seseorang ingin

menjadi pelacur pasti terdapat berbagai macam perdebatan yang tidak bisa dikur paramter kesalahan dan kebenaran dari segala presepsi yang diberikan oleh masyarakat. Latar belakang yang menyebabkan seseorang untuk menjadi seorang pelacur dapat diakibatkan oleh patalogi atau suatu penyakit masyarakat yang sudah sedari dahulu tidak bisa dihilangkan dari masyarakat, dan adapula yang berpendapat sebaliknya². Tentu saja masyarakat yang menggantungkan hidup di Gang Dolly seperti para PKL, PSK, serta para pemilik kamar merasa sangat dirugikan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Risma ini. Sehingga, salah satu jalan yang ditempuh mereka yaitu dengan melakukan protes ke DPRD Kota Surabaya. Dengan adanya protes tersebut, DPRD Kota Surabaya pun akhirnya merespon apa yang dikeluhkan oleh masyarakat yang terdampak oleh penutupan dengan mengundang pemkot terkait *blue print* penutupan Dolly, namun mereka selalu absen.

Partai politik merupakan representasi dari wujud demokrasi dari sistem pemerintahan di Indonesia. Yangmana sangat tidak mungkin apabila semua masyarakat Indonesia ingin berlomba-lomba untuk memperoleh kedudukan dalam pemerintah untuk membela dan memperoleh hak-haknya. Dengan ini dibutuhkannya perwakilan-perwakilan dari masyarakat itu sendiri yang memiliki peran penting untuk menyalurkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat, supaya aspirasi mereka dapat ditangani dan dapat terfasilitasi dengan baik. Proses perwakilan ini sebagian besar diambil peran oleh lembaga perwakilan daerah maupun lembaga daerah pusat, atau seringkali kita sebut sebagai DPRD dan/atau DPR. Seseorang tidak akan bisa menepati posisi sebagai DPR maupun DPRD tanpa adanya fasilitator dari partai politik, hal ini dapat kita amati dalam proses perpolitikan di Indonesia. dalam prosesnya, seseorang wajib bergabung sebagai kader partai politik terlebih dahulu sebelum dirinya dapat mencalonkan diri sebagai seorang yang menepati kedudukan di DPR, DPRD maupun kedudukan lembaga pemerintah lainnya dalam lingkup legislatif dan pemimpin lembaga resmi eksekutif. Dengan adanya peran keterwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia, yangmana peran itu dimiliki oleh DPR dan DPRD. Maka setiap keputusan yang bersangkutan dengan urusan masyarakat secara kompleks akan ditentukan oleh pemerintah. Dalam implementasinya pemerintah akan memiliki *over power* untuk membetukan kebijakan dan arah pembangunan negara yang akan berpengaruh pada terwujudnya dan tidak terwujudnya cita-cita yang sudah sedari dulu kala dirancang oleh para *the founding father*. Selain memiliki peran untuk memberikan aspirasi masyarakat, partai politik juga memiliki peran untuk mewujudkan posisi lembaga negara secara stabil, dimana tidak ada *over power* dari salah satu lembaga negara sehingga dapat terwujudnya keseimbangan.

¹ Nanda Suliandi Oktaviari. "JARINGAN SOSIAL MUCIKARI PASCA PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY SURABAYA" Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Paradigma. Volume 05 Nomor 02 Tahun 2017. hlm. 1

² Hartini Retnaningsih. "DAMPAK SOSIAL PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Vol. VI, No. 13/1/P3DI/Jul/2014.

Keseimbangan ini sangat penting demi terwujudnya *good governance* dalam lingkup pemerintahan di Indonesia. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah akan menentukan arah pembangunan yang berdampak pada tingkat kemajuan suatu negara. Partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, serta menciptakan tatanan sistem politik yang berkualitas sesuai dengan prinsip *good governance*. Hal ini juga yang akan memberikan dampak positif dan negatif bagi partai yang mengusung sosok figur tersebut. Karena di sisi lain, masyarakat Surabaya senang dengan langkah berani yang ditunjukkan, namun di sisi sebaliknya ada masyarakat yang dikorbankan mata pencahariannya. Hal ini akan menjadikan kebijakan tersebut seperti perjudian bagi partai politik yang mengusung, karena akan mendompleng suara partai politik tersebut di pemilihan berikutnya karena berhasil memberantas prostitusi yang terjadi. Atau malah sebaliknya, suaranya akan turun karena akan muncul dampak-dampak baru yang terjadi.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selalu dieluh-eluhkan untuk terlaksana sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya, yang mana pemilihan umum sudah semestinya dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil (LUBER JURDIL). Pelaksanaan pesta demokrasi yang diwujudkan melalui pemilu tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, namun juga bagi warga negara yang sudah memiliki ketentuan umur sebagai mestinya sehingga dirinya memperoleh hak untuk menyuarakan siapa yang ia inginkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, dengan harapan dapat berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Namun dibalik semua itu, pasti ada suatu tindakan politis yang cenderung menggoyahkan idealis para pemilih untuk menentukan pemimpin yang ia inginkan. Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, yang akan dipilih oleh sekelompok masyarakat yang telah memperoleh kewenangan untuk menggunakan hak suaranya maka akan menghasilkan para pemimpin lembaga negara baik dalam lingkup eksekutif maupun legislatif. Yang akan dipilih dalam lingkup legislatif adalah DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Dan yang akan dipilih dalam lingkup eksekutif adalah kepala dan wakil kepala dari setiap pembagian wilayah di Indonesia, dari lingkup pusat negara sampai lingkup yang paling kecil yakni Kepala Daerah Kabupaten atau Kota. Respon pemilih dalam proses keterlibatannya dalam pelaksanaan pemilihan umum akan sangat dimanuver oleh suasana perpolitikan yang ada dan sudah tertanam dalam benak masyarakat yang akhirnya akan mewujudkan suatu kebiasaan. Seperti halnya politik demokrasi, serta ragam sosiokultural yang turut serta memberikan kontribusi pertumbuhan dan perkembangan³. Dalam hal ini, pemilihan umum bisa dijadikan wadah

masyarakat, khususnya di Gang Dolly yang kontra terhadap kebijakan penutupan lokalisasi tersebut pada Pemilu 2019 yang akan memilih calon DPRD Kota, sekaligus menjadi barometer partai dan kepuasan warga, khususnya di kelurahan Putat Jaya terkait kebijakan pembubaran lokalisasi ini melalui hasil pemilu yang akan terjadi.

Dari beberapa data di atas, muncullah ide dan keinginan penulis untuk meneliti tentang perilaku pemilih, khususnya warga kelurahan Putat Jaya terhadap kebijakan yang dilakukan pemkot pada pemilu yang terjadi di periode berikutnya yaitu Pemilu 2019 yang akan memilih anggota DPRD Kota Surabaya. Penulis sangat tertarik meneliti hal ini karena politik merupakan hal yang sangat menarik bagi sejarah, karena menyangkut dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan publik. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi, tentu saja peranan partai politik sangatlah penting karena wakil rakyat atau pemimpin dipilih sebagian besar melalui calon yang diusung partai politik.

Penelitian ini akan berfokus pada perilaku pemilih, khususnya di kelurahan Putat Jaya yang merupakan wilayah Gang Dolly. Mengingat Gang Dolly memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan prostitusi, khususnya di Surabaya. Serta, perilaku pemilih yang pro dan kontra terhadap kebijakan yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian adalah metode penelitian sejarah. Dalam prosesnya penelitian sejarah merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam sumber sejarah yang berkaitan dengan informasi dan kerangka penelitian yang sudah ditentukan oleh peneliti. Sumber yang diperlukan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai macam proses dan metode pengumpulan data, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Sumber primer

Sumber data primer diperoleh dari proses peneliti untuk melaksanakan pengamatan yang dilakukan dengan cara menyaksikan, mendengar, dan mengalami secara langsung peristiwa yang ditulis dalam sumber. Nantinya, penulis akan mencari sumber ini melalui wawancara dan observasi serta studi pustaka.

a) Wawancara

Pada penelitian ini, penulis akan memberikan pertanyaan mengenai perilaku pemilih dalam Pemilu 2019, khususnya pileg DPRD Kota Surabaya pasca penutupan lokalisasi Dolly, serta agenda-agenda kampanye, serta strategi yang dilakukan partai politik dalam menggaet dukungan suara di TPS-TPS eks lokalisasi Dolly. Selanjutnya, penulis akan mendatangi informan yang akan diwawancarai. Informan tersebut meliputi :

³ Agus Machfud Fauzi. "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019". Universitas Negeri Surabaya, Surabaya. *Journal of Islamic Civilization*. Vol. 1, No. 1, Maret 2019. hlm. 40-48. 41-42

- 1). Ketua RT/RW eks Gang Dolly
- 2). Warga UMKM binaan pemkot eks lokalisasi Dolly
- 3). Warga domisili asli Gang Dolly

Informan tersebut merupakan bagian dari warga eks lokalisasi Gang Dolly, sehingga penulis memilih informan tersebut dengan harapan akan lebih mudah dalam memperoleh sumber informasi berkenaan dengan perilaku pemilih warga eks Gang Dolly

b) Studi Pustaka

Pengumpulan data melalui metode pengumpulan studi pustaka merupakan proses pengumpulan data yang dilaksanakan guna memperoleh informasi-informasi yang dapat menunjang penelitian melalui sumber tertulis yang memuat informasi sejarah yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini mengumpulkan sumber tertulis yang diperoleh dari KPU tentang hasil pemilu yang sudah dilakukan untuk melihat partisipasi politik warga eks lokalisasi serta perilaku warga dalam memilih.

c) Observasi

Observasi penelitian merupakan salah satu cara metode pengumpulan data dimana peneliti akan terjun secara langsung untuk melakukan pengamatan secara langsung. Pengamatan dilaksanakan guna menengok tindak perilaku yang dilakukan oleh objek penelitian. Dalam proses pengamatan, peneliti tidak hanya menjadi peneliti dan mengamati saja, namun peneliti juga ikut berpartisipasi aktif dalam proses interaksinya dengan masyarakat, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang faktual. Data faktual sebagaimana dimaksud diperoleh dari hasil pengamatan peneliti yang dimuat dalam catatan singkat yang menjelaskan hasil pengamatan peneliti terhadap apa yang ingin ia peroleh sebagaimana garis besar kerangka penelitian.

Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu oleh peneliti lain. Umumnya sumber sekunder berasal dari buku-buku atau artikel hasil kajian tentang suatu peristiwa sejarah. Pada penelitian ini, sumber sekunder menggunakan sumber berupa artikel dan berita-berita dari media masa yang relevan dengan kajian topik penelitian. Penulis akan mencari sumber dengan mengunjungi warga eks lokalisasi.

Kritik Sumber

Dalam metode sejarah, kritik sumber sangat penting dilakukan. Kritik sumber atau kritik ilmiah berupaya untuk meneliti sumber-sumber sejarah yang telah didapat. Kritik sumber berguna untuk menentukan palsu

tidaknya suatu dokumen. Pada intinya, kritik sumber ada untuk menguji ulang validitas data dari sumber-sumber yang sudah didapat. Sehingga, penulisan sejarah memperoleh fakta yang tepat. Dalam perolehan data melalui proses kritik sumber, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis kritik sumber, yaitu kritik sumber intern dan kritik sumber ekstern.

a. Kritik ekstern merupakan tahap mengkritisi sumber dari segi fisik atau wujudnya. Pengecekan ini untuk membuktikan keabsahan sumber. Cara penulis menguji keabsahan sumber adalah dengan menyeleksi dan memilah sumber penelitian yang berkaitan dengan perilaku pemilih berupa dokumen, arsip, dan jurnal mengenai sejarah Gang Dolly, partisipasi politik yang diperoleh dari pengumpulan data oleh lembaga pemilihan umum terkait seperti halnya KPU. Proses kritik ekstern pada KPU dilaksanakan untuk memberikan pengujian terhadap jenis kertas, serta jenis tinta yang digunakan untuk proses mencetak kartu suara dalam pelaksanaan pemilihan umum. Selain meninjau hal tersebut, peneliti juga memberikan pengujian terhadap berbagai aspek lainnya, yakni antara lain faktor latar belakang yang dimiliki oleh pengarang guna memberikan identifikasi terhadap tulisan, tanda tangan, materai, serta jenis huruf guna menghindari kemungkinan terburuk terjadinya pemalsuan data dalam dokumen.

b. Kritik intern dimaksudkan untuk mengkritisi sumber guna melihat kredibilitas subjektivitas dan objektivitas penulisan sumber. Di sini penulis akan mengkaji isi dari sumber, baik dokumen, arsip, maupun buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Cara yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan perbandingan terhadap sumber sejarah yang sebelumnya telah diperoleh dari proses pengumpulan data melalui dokumen dan arsip terkait perilaku pemilih, akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti dalam proses wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan beberapa kriteria objek wawancara, yang mana objek wawancara tersebut merupakan penduduk asli di wilayah Dolly. Dengan ini, peneliti memusatkan objek wawancara kepada Ketua RT/RW eks Gang Dolly, warga UMKM binaan pemkot eks lokalisasi Dolly, serta warga yang memiliki domisili asli Gang Dolly. Informasi yang diperoleh oleh peneliti dalam proses wawancara akan dibandingkan dengan perolehan informasi yang didapatkan peneliti sebelumnya dalam proses pengkajian studi pustaka guna menguatkan data sekunder dalam penelitian. Proses perbandingan data yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara akan digunakan sebagai pengukur tingkat keabsahan data yang menunjukkan fakta dan kebenaran data. Dengan ini, kritik intern yang akan dilakukan oleh peneliti akan menghasilkan jawaban sebagaimana realitas yang ada di masyarakat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Interpretasi

Dalam metode interpretasi, penulis akan menghubungkan dan menafsirkan berbagai sumber yang telah diperoleh menjadi fakta baru yang nantinya akan memudahkan proses penulisan. Tentunya sumber-sumber tersebut tidak langsung dihubungkan begitu saja, namun dipilah terlebih dahulu. Disesuaikan dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Setelah itu, baru dapat dilakukan penyusunan dan penulis harus bersikap obyektif.

Historiografi

Historiografi merupakan tahap penyusunan penulisan peristiwa sejarah. Pada tahap akhir ini, penafsiran penulis yang sudah didapatkan melalui sumber yang sudah tidak diragukan lagi keabsahannya disusun secara deskriptif dan kronologis menjadi suatu karya ilmiah sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokalisasi Dolly

Wilayah lokalisasi Dolly merupakan salah satu wilayah lokalisasi terbesar dalam lingkup Asia Tenggara. Lokalisasi Dolly berada di wilayah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Jawa Timur. Karena merupakan salah satu situs lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, maka banyak warga masyarakat yang bertumpu dan menggantungkan hidup pada lokalisasi Dolly. Maksudnya adalah banyak warga masyarakat yang memiliki profesi untuk menunjang segala aktivitas yang dibutuhkan dalam lokalisasi tersebut. Jadi tidak hanya PSK saja yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya aktivitas di lokalisasi Dolly, namun juga perlu adanya profesi lain sebagaimana contoh pegawai salon, pencuci baju, tukang parkir, tukang becak. Meskipun dirasa wilayah lokalisasi acapkali dianggap hina oleh sebagian besar masyarakat lainnya, namun masyarakat yang hidup di wilayah Dolly tentu saja tidak bisa berputus. Karena mau bagaimanapun mereka lahir dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada disana. Interaksi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat untuk turut serta menjalankan aktivitas lokalisasi Dolly yang sudah sedari dulu dilaksanakan pencu. Oleh karena itu, pada saat Wali Kota Surabaya yakni Ibu Risma ingin membuat kebijakan untuk menutup wilayah lokalisasi tersebut masyarakat memberikan tanggapan pro dan kontra. Tanggapan pro yang diberikan oleh masyarakat adalah ingin membersihkan dan membebaskan wilayah Dolly sebagai wilayah yang hina karena banyaknya

praktik maksiat yang terjadi disana, namun disisi lain masyarakat yang kontra terhadap kebijakan tersebut menentang adanya penutupan karena dianggap akan menghilangkan sebagian besar lapangan pekerjaan yang ada disana⁴.

Wilayah Dolly sebagian besar didominasi oleh wilayah pemukiman yang cenderung sepi. Setelah adanya penutupan wilayah Dolly maka Pemerintah Daerah Surabaya melakukan pembangunan kembali terhadap wilayah tersebut dan mulai digunakan sebagai wilayah yang layak tinggal oleh masyarakat. Pada kepemimpinan Wali Kota sebelumnya yakni Bapak Muhaji Wijaya, wilayah Dolly sudah menjadi topik terhangat masyarakat Kota Surabaya. Pada saat itu wilayah Dolly sudah dikenal sebagai wilayah pelacuran yang cukup ramai dan bahkan semakin membesar. Meskipun, telah dilakukan penutupan oleh Ibu Risma selaku Wali Kota Surabaya selanjutnya, wilayah Dolly tetap menjadi wilayah yang sangat ramai. Alasan tempat ini tetap ramai adalah kebiasaan dari masyarakat yang telah mengenal Dolly sebagai tempat lokalisasi. Selain itu, kawasan Dolly juga memberikan daya tarik tersendiri bagi sekelompok masyarakat tertentu sehingga menjadi magnet bagi setiap masyarakat yang ingin berkunjung disana. Salah satu ciri khas dari wilayah Dolly adalah kebiasaan masyarakat untuk memajang para pekerja seks dalam akuarium seperti ikan supaya para pelanggan dapat memilih mereka. Dan tindakan ini sudah biasa dan bahkan dianggap sebagai tindakan yang menjadi ciri khas dari wilayah Dolly⁵.

B. Pembubaran Gang Dolly

Dalam Pembubaran lokalisasi gang Dolly walikota Surabaya Tri Rismaharini mempunyai peran penting dalam menutup lokalisasi tersebut dikarenakan tempat lokalisasi gang Dolly yang sangat dekat dengan perkampungan warga dimana hal tersebut Kebijakan Wali Kota Surabaya pada tanggal 18 Juni 2014 menjadikan perdebatan di kalangan warga Surabaya. Mereka terbelah menjadi dua. Ada yang memuji kebijakan Risma ini sebagai langkah berani yang ditunjukkan untuk memberikan kebebasan terhadap warga Surabaya akan adanya prostitusi. Namun, disisi respon positif yang diberikan oleh masyarakat, ada pula masyarakat yang memberikan respon negatif dan melakukan aksi protes dikarenakan prostitusi di

⁴ Ode Dedy Lion, Feky Manuputty, Prapti Murwani "DOLLY DAHULU DAN SEKARANG" Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. *JURNAL ILMU SOSIOLOGI*. Mei 2021 Vol. 4 No. 1. hlm. 1 — 13.2

⁵ *Ibid.*, hlm. 4

Gang Dolly dapat menghidupi masyarakat. Selain itu, mereka juga akan mengkhawatirkan jika lokalisasi ini dibubarkan, maka yang akan terjadi akan lebih buruk karena mereka yang hidup dari praktik ini akan menyebar dan tidak bisa dikontrol penuh oleh pemerintah. Yang perlu menjadi point inti dalam pembahasan penelitian ini adalah eksistensi kegiatan prostitusi dapat terjalin karena pengaruh adanya logika bisnis, yakni *supply* dan *demand*⁶.

Ditinjau dari sisi politik, tentu saja kebijakan yang dikeluarkan oleh orang yang ada di dalam pemerintahan, baik partai politik, DPRD, maupun wali kota akan menimbulkan konsekuensi terhadap elektabilitasnya pada pemilihan yang akan datang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan sebuah keputusan yang dihasilkan melalui proses terciptanya kebijakan yang sebagian besar dibuat oleh lembaga suprastruktur yakni lembaga pemerintah. Keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah cenderung bersifat mengikat dan memaksa, dimana setiap masyarakat bersifat wajib untuk mematuhi. Proses seorang warga negara dapat berkecimpung dalam dunia lembaga negara baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif harus dilaksanakan setelah adanya pemilihan umum, dimana setiap warga masyarakat harus menggunakan hak suara yang mereka miliki untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk menduduki kursi kepemimpinan di eksekutif maupun legislatif. Hal ini selaras dengan sistematisa Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No.22 Tahun 2007, dimana pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan Pemilu guna memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷.

C. Respon Pemerintah dan Masyarakat dalam Menindaklanjuti Pembubaran Gang Dolly

Keputusan pemerintah untuk melakukan penutupan terhadap lokalisasi Gang Dolly bukan merupakan suatu keputusan yang mudah. Namun disisi lain, ada dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga lain supaya Gang Dolly dapat ditutup dengan menimbang segala macam efek negatif yang diakibatkan oleh adanya lokalisasi tersebut. Dukungan ditutupnya gang Dolly juga diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Pemerintah Provinsi. Dukungan dan penolakan penutupan Gang Dolly merupakan perdebatan yang pelik bagi kalangan masyarakat serta lembaga masyarakat tertentu. Pro kontra ini

tidak dapat dilepaskan dari sejarah Gang Dolly yang dimulai oleh pembukaan kawasan usaha pelacuran oleh Dolly Khavit yang juga merupakan mantan PSK. Usaha pelacuran ini dibangun di sekitar perkuburan Tionghoa. Usaha ini diawali oleh dibangunnya sebuah wisma yang dinamakan Barbara, serta mengangkat mucikari yang berasal dari Kampung Cemoro Sewu.

Pembangunan awal Gang Dolly dimulai pada saat dibangunnya wisma Barbara dan semakin berkembang pesat sehingga muncul 800 wisma lokalisasi, kafe dangdut, serta panti pijat yang melayani secara yang tidak semestinya. Dalam sejarah perkembangan Gang Dolly dapat ditemukan sekitar 9.000 para penjahat cinta, banyak pelacur yang memiliki umur di bawah ketentuan yang ada, germo, serta para ahli pijat yang senantiasa siap sedia untuk memberikan jasanya. Menurut sumber yang diperoleh oleh peneliti, setiap PSK yang berada di Gang Dolly dapat melayani 10 sampai 13 pelanggan dalam satu malam. Ramainya perkembangan Gang Dolly yang acapkali dijajaki oleh para pengunjung menjadikan masyarakat di sekitar wilayah Dolly sangat menggantungkan kehidupan mereka sehingga muncul berbagai macam mata pencaharian yang ada di sekitar wilayah Gang Dolly.

Adanya lokalisasi di Gang Dolly ini menjadikan cikal bakal wajah kota Surabaya yang kurang baik dipandang oleh masyarakat. Karena dengan ini muncul adanya istilah bahwa Surabaya merupakan Kota Sejuta PSK. Untuk meminimalisir adanya prespektif negatif terhadap wajah Ibu Kota Provinsi Jawa Timur tersebut, Kementerian Sosial memberikan tunjangan tabungan sebesar Rp 4.200.000 kepada 960 PSK yang merupakan mantan pekerja lokalisasi di wilayah Gang Dolly. Dengan adanya tunjangan tabungan yang diberikan oleh pemerintah maka jumlah PSK yang berada di Gang Dolly semakin menurun. Anggapan ini selaras dengan latar belakang para PSK untuk melakukan tindakan tercela, sebagian besar latar belakang yang menggerakkan diri mereka untuk melakukannya adalah keterbatasan ekonomi. Dan dengan adanya tunjangan yang diberikan oleh Kementerian Sosial sebagaimana yang ada, maka mereka akan mulai mengubah hidup mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pada waktu sebelum penutupan, yang lebih tepatnya pada Bulan Mei 2012 dapat ditemukan sekitar 1.080 PSK yang bekerja secara aktif di kawasan Gang Dolly. Jumlah ini semakin menurun dari tahun ke tahun, sebagaimana data yang diperoleh yakni pada tahun 2011 terdapat 1.132 PSK.

Selain memberikan kompensasi terhadap para PSK yang kehilangan lapangan pekerjaan mereka. Pemerintah Kota Surabaya juga menyiapkan dana sebesar Rp 16 miliar guna membeli seluruh wisma yang digunakan sebagai operasi lokalisasi di Gang Dolly, wisma yang akan dibeli oleh pemerintah

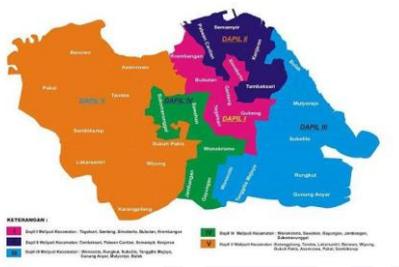
⁶ Hartini Retnaningsih. "DAMPAK SOSIAL PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Vol. VI, No. 13/1/P3DI/Juli/2014

⁷ UU No. 22 Tahun 2007

tersebut. Supaya warga masyarakat yang tinggal di Gang Dolly dapat melakukan revolusi terhadap kebiasaan yang ia laksanakan dahulu maka pemerintah perlu memberikan program secara gencar untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga potensi masyarakat untuk kembali pada dunia pelacuran dapat berkurang⁸.

D. Perilaku Pemilih

Secara Administratif pada pemilu 2019 gang dolly memilih DPRD untuk Daerah Pilihan 4 meliputi Kecamatan Gayungan, Jambangan Sawahan, Sukomanunggal, Wonokromo ditemukan beberapa penemuan yang terklasifikasikan sebagai berikut :



Hasil rekapitulasi suara DPRD dapil 4 Surabaya 2019

Berdasarkan situs resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ditemukan data atau hasil suara Pemilu DPRD Daerah Pilihan 4 Surabaya sebagai berikut :



Gambar data pemilih berdasarkan jenis kelamin daerah pemilihan DPRD dapil 4 Surabaya diatas berasal dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) tahun 2019, dimana dari statistik gambar tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Daerah 4 pemilihan DPRD Kora Surabaya meliputi lima kecamatan yang ada di Surabaya yakni Kecamatan Wonokromo, Sawahan, Gayungan, Jambangan dan juga Suko manunggal.

Fokus penelitian ini terletak pada daerah “Dolly” tepatnya di daerah Jarak Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan.

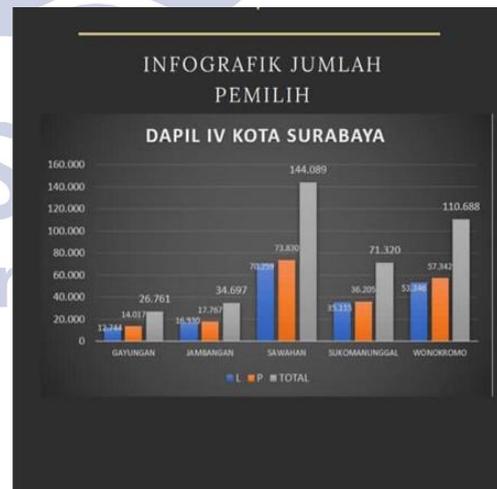
- b. Terdapat sebanyak 188.394 (seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) jiwa daftar pemilih terdaftar (DPT) berjenis kelamin laki-laki dan juga 199.161 (seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu) jiwa Daftar Pemilih Terdaftar (DPT) berjenis kelamin perempuan.

Hasil rekapitulasi suara pemilihan DPRD 2019 tingkat kelurahan pada Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Kecamatan Sawahan termasuk dalam daerah pemilihan 4 Surabaya yang memiliki jumlah DPT (Daftar Pemilih Terdaftar) sebanyak 144.089 (seribu empat ratus empat puluh empat ribu delapan puluh sembilan) jiwa yang terbagi menjadi enam kelurahan yakni :

1. Kelurahan Patemon
2. Kelurahan Sawahan
3. Kelurahan kupang krajan
4. Kelurahan Banyu urip
5. Kelurahan Putat Jaya
6. Kelurahan Pakis

Dari keseluruhan Kecamatan yang termasuk dalam Daerah Pemilihan 4 DPRD Kota Surabaya, Kecamatan Sawahan merupakan Daerah Pilihan dengan daftar pemilih terdaftar terbanyak dengan pengguna hak pilih sebanyak 111.311 jiwa dengan persebaran laki-laki sebanyak 52.319 jiwa dan perempuan sebanyak 58.992 jiwa, yang tersebar sebagai berikut .:



- Kelurahan banyu urip dengan DPT 27.849 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 15.240 jiwa dan suara sah sebanyak 14.908
- Kelurahan Kupang Krajan dengan total DPT sebanyak 17.710 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 9.439 jiwa dan suara sah sebanyak 9.218 jiwa

⁸ Hartini, R. (2014). Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly. Info Singkat Kesejahteraan Sosial.

- Kelurahan Pakis dengan total DPT sebanyak 26.700 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 14,308 jiwa dan suara sah sebanyak 14.657 jiwa
- Kelurahan Patemon dengan total DPT sebanyak 28.803 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 14.529 jiwa dan suara sah sebanyak 14.746 jiwa
- Kelurahan Putat Jaya dengan total DPT sebanyak 32.206 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 16.729 jiwa dan suara sah sebanyak 16.731 jiwa
- Kelurahan Sawahan dengan total DPT sebanyak 14.985 jiwa, yang menggunakan hak pilih sebanyak 7.474 jiwa dan suara sah sebanyak 7.322 jiwa

Dengan pemetaan pemilih dibagi menjadi 11 kategori atau klasifikasi yakni :

- Keluarga
- Muda
- Pemula
- Penyandang disabilitas
- Perempuan
- Berkebutuhan khusus
- Kaum marjinal
- Kegamaan
- Komunitas
- Warga internet
- Komunitas demokrasi

Partisipasi Politik Kelurahan Putat Jaya PEMILU (DPRD) tahun 2019

Menurut sumber dari situs resmi KPU- terdapat sebanyak 32.206 jiwa yang menggunakan hak politiknya yakni hak untuk memberikan suara pada Pemilu tahun 2019 yang menggunakan hak pilih sebanyak 16.729 jiwa dan suara sah sebanyak 16.731 jiwa.

No	Kelurahan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Usta Masuk
1	BANYU URIP ▶	27.849	14.908		14.927	308	15.240	55 / 55 TPS
2	KUPANG KRAJAN ▶	17.710	9.439		9.218	201	9.439	34 / 34 TPS
3	PAKIS ▶	26.700	14.657		14.026	279	14.308	50 / 50 TPS
4	PETEMON ▶	28.803	14.746		14.293	238	14.529	92 / 92 TPS
5	PUTAT JAYA ▶	32.206	16.731		16.328	401	16.729	54 / 54 TPS
6	SAWAHAN ▶	14.985	7.474		7.322	152	7.474	30 / 30 TPS

Perolehan data suara pada pemilihan umum tahun 2019.

Terhitung sebanyak 16.077 jiwa tidak menggunakan politiknya untuk memberikan suara pada pemilihan DPRD di daerah pilihan 4 Kota Surabaya,

terhitung hampir 49,9% (dalam presentase) tidak menggunakan hak pilih atau tidak memberikan suara pada Pemilihan anggota DPRD Daerah pilihan 4 Kota Surabaya.

Dari data yang tertuliskan dapat ditarik benang merah atau kesimpulan bawasanya warga Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang terdaftar pada DPT (Data Pemilih Terdaftar) sebanyak 16.077 (enam belas ribu tujuh puluh tujuh) jiwa atau sebanyak 49,9% belum sadar akan pentingnya memberikan hak pilih atau perihal demokrasi yang sudah menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Data yang telah diperoleh memberikan penjelasan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya disadari urgentsinya oleh masyarakat atau warga negara Indonesia itu sendiri dengan ditemukannya data yang konkrit seperti yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Dimana sesuai amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 28, yang mana memberikan kejelasan bahwa setiap warga negara yang diakui secara sah oleh Negara Indonesia memiliki hak untuk berpolitik yang mana didalam hak berpolitik tersebut terdapat hak memilih dan dipilih.

Penekanan tersebut juga dijelaskan oleh Pak Subairi selaku divisi partisipasi masyarakat mengatakan : “partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum baik itu pilpres, pileg, atau pilkada mengalami naik turun. Jika kita lihat pada pilpres 2014 contoh nya partisipasi masyarakat berada diangka 66.4%, lain juga pada pemilu serentak dimana partisipasi masyarakat Surabaya sebanyak 72.6% dengan adanya pemilihan secara serentak Pilpres, DPD-RI, DPR-RI, DPR-Provinsi, dan DPRD Kota Surabaya secara tidak langsung memberikan kenaikan yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat Surabaya”

Nur Syamsi selaku ketua KPU Kota Surabaya juga memperkuat terkait dengan pendapat pak Subairi : “partisipasi masyarakat Surabaya itu seringkali naik turun mas, baik itu dipilwali 2015, pilpres 2014, pilgub 2018, dan pemilu serentak 2019. Naik turun pasrtisipasi masyarakat itu tidak bisa ditebak, akan tetapi sebagai lembaga penyelenggara KPU Kota Surabaya selalu mendorong dan mensosialisasikan terkait dangan pemilihan secara semaksimal mungkin.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian sekaligus pembahasan penelitian perihal Perilaku Pemilih Warga Eks-Lokalisasi Dolly Pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4) terdapat beberapa penemuan data serta poin penting yakni data jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT (Daftar pemilih terdaftar) pada Pemilihan DPRD Kota Surabaya daerah pilihan 4.

Ditemukan tiga poin penting dalam penelitian Perilaku Pemilih Warga Eks-Lokalisasi Dolly Pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4) yakni

Hasil rekapitulasi suara DPRD dapil 4 Surabaya 2019 data ini menjadi penting karena dengan landasan atau tendensi data hasil rekapitulasi suara DPRD dapil 4 Surabaya 2019 dapat memberikan pertimbangan yang jelas serta konkrit dalam memilih dan memetakan data pemilih terdaftar dalam penelitian perilaku Pemilih Warga Eks-Lokalisasi Dolly Pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4.

Hasil rekapitulasi suara pemilihan DPRD 2019 tingkat kelurahan pada Kecamatan Sawahan Kota Surabaya untuk memberikan data yang konkrit dalam pemetaan data pemilih terdaftar yang lebih spesifik dan mengerucut pada objek daerah yang menjadi latar tempat penelitian Perilaku Pemilih Warga Eks-Lokalisasi Dolly Pada PEMILU 2019 (DPRD Kota Surabaya Dapil 4.

Menurut sumber dari situs resmi KPU- terdapat sebanyak 32.206 jiwa yang menggunakan hak politiknya yakni hak untuk memberikan suara pada Pemilu tahun 2019 yang menggunakan hak pilih sebanyak 16.729 jiwa dan suara sah sebanyak 16.731 jiwa

Terhitung sebanyak 16.077 jiwa tidak menggunakan politiknya untuk memberikan suara pada pemilihan DPRD di daerah pilihan 4 Kota Surabaya, terhitung hampir 49,9% (dalam presentase) tidak menggunakan hak pilih atau tidak memberikan suara pada Pemilihan anggota DPRD Daerah pilihan 4 Kota Surabaya.

Dari data data yang didapat maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya perilaku memilih warga gang dolly masih cukup rendah karena masih kurang dari 50 persen dari jumlah dpt. hal tersebut menunjukkan akan kesadaran politik warga yang masih rendah serta jalur demokrasi seperti pemilihan umum sebagai penyalur aspirasi karena memilih pemimpin yang dapat menentukan arah kebijakan publik tidak menjadi terlalu berpengaruh bagi warga sekitar gang dolly.

Pro dan kontra soal penutupan dolly pun sudah tak terdengar seriu awal awal lokalisasi ini dibubarkan. warga yang sedari awal pro penutupan pun memulai hidup di wajah gang doly yang baru memulai bisnis umkm yang diwacanakan walikota dan di bawah naungan pemkot.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu: pertama, perlu adanya tindak lanjut dari aktor-aktor dan instrumen sosial lain yang terkait sebagai penggerak aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada daerah pilihan 4 Kota Surabaya dalam pemilihan Anggota DPRD Jawa Timur.

Kedua, memberikan solusi konkrit perihal partisipasi politik juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya memberikan hak suara terhadap keberlangsungan sistem demokrasi yang ada di Kelurahan putat jaya dalam hal ini yang termasuk dalam daerah eks-lokalisasi dolly yang menajadi titik fokus dari penelitian,tentang tidak politik dan juga

metode yang digunakan dalam membangun citra politik yang baik dalam hal demokrasi.

Ketiga, memberikan inprovisasi dan juga perumusan formula yang lebih konverhensif solutif tentang peningkatan partisipasi politik didaerah tersebut menjadikan peran toko masyarakat yang lebih berperan aktif sekaligus memberikan hak suara sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perihal hak berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akbar, Abdi, dkk. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat. Jakarta: Bawaslu, 2019.

Amirudin dan Bisri, Pilkada Langsung Problem dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

Agus Machfud Fauzi. "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019". Universitas Negeri Surabaya, Surabaya. Journal of Islamic Civilization. Vol. 1, No. 1, Maret 2019. hlm. 40-48. 41-42

Fauzia, Eva. "Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Pangandaran". Jurnal Moderat 5, No 2 (2019): 183 – 110

Hartini, R. (2014). Dampak Sosial Penutupan Lokalisasi Dolly. Info Singkat Kesejahteraan Sosial

Hartini Retnaningsih. "DAMPAK SOSIAL PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Vol. VI, No. 13/I/P3DI/Juli/2014

Nanda Suliandi Oktaviari. "JARINGAN SOSIAL MUCIKARI PASCA PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY SURABAYA" Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Paradigma. Volume 05 Nomor 02 Tahun 2017

Ode Dedy Lion, Feky Manuputty, Prapti Murwani "DOLLY DAHULU DAN SEKARANG" Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. JURNAL ILMU SOSIOLOGI. Mei 2021 Vol. 4 No. 1

Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik". Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3, No. 1 (2018): 1-25

Zaenab, Siti. “Strategi Komunikasi KPU Bangkalan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Skripsi

Hariyanto, Nicolas. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sumatera Utara Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera” Skripsi. Universitas Sumatera Utara, 2018

Hasibuan, Sri Juniarti. “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasinya Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan)”. Skripsi. Universitas Medan Area Medan, 2018.

Sakti, Darmawan Satrio. “Strategi KPU Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Provinsi Banten 2017”. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018.

